**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP untuk LKPD Kab. Gayo Lues TA 2015**

**Banda Aceh, Jumat ( 26 Mei 2016 )** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2015 yang merupakan penyerahan LHP Ketiga diwilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2015 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini atas LKPD Kabupaten Gayo Lues untuk Tahun Anggaran 2015 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atau*"Unqualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Dana Hibah dan/atau Bantuan Sosial pada Sekolah Negeri Belum Melalui Mekanisme APBK serta Digunakan Langsung;
2. Pengelolaan Persediaan Obat-Obatan dan Barang Medis Habis Pakai Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Belum Tertib;
3. Pengelolaan Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Belum Optimal yang Mengakibatkan Kabupaten Gayo Lues Berpotensi Kehilangan Pendapatan Retribusi;
4. Aset Tetap yang berasal dari Belanja Tak Terduga dan APBN belum dicatat dan dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Belum Sepenuhnya Mendukung Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata dilihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Gayo Lues segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*